

ANALISIS PERSEBARAN PEMANFAATAN PERHUTANAN SOSIAL DAN TINGKAT KEAKTIFAN KELOMPOK MASYARAKAT TANI DALAM PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL DI KECAMATAN BAYAT

INTISARI

Perhutanan Sosial merupakan program Nasional untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar yakni lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persebaran pemanfaatan perhutanan sosial di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten dan menganalisis tingkat keaktifan kelompok masyarakat tani di dalam pengelolaan perhutanan sosial di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Metode dalam penelitian ini berupa Metode Analisis Deskriptif yang digunakan didalam mendeskriptifkan kegiatan operasional yang terkait tentang proses pengelolaan perhutanan sosial oleh kelompok masyarakat tani. Didukung dengan data dan informasi hasil observasi dan pemetaan *Participatory GIS* persebaran wilayah pemanfaatan perhutanan sosial dikompilasi dalam bentuk tabel, kemudian dideskripsikan dan diinterpretasikan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pola pemanfaatan lahan, jenis tanaman, potensi lahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan perhutanan sosial Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Sehingga diperoleh hasil analisis berupa persebaran pemanfaatan perhutanan sosial di Kecamatan Bayat menunjukkan terdapat 12 Desa sebagai pengelola perhutanan sosial serta rata-rata presentase tiap aspek teknik, aspek kelembagaan, aspek sosial, dan aspek ekonomi digunakan untuk menunjukkan peran kelompok tani dapat dikatakan aktif dalam mengelola perhutanan sosial di Kecamatan Bayat. Persebaran pemanfaatan perhutanan sosial menghasilkan wilayah kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan dan kawasan hutan lindung sehingga adanya perhutanan sosial yang dikelola secara aktif dapat melatih dan mengembangkan bakat yang ada di dalam kelompok masyarakat tani dan menimbulkan inovasi untuk menciptakan usaha budidaya yang mampu mengeksklore manfaat yang ada didalam perhutanan sosial.

Kata Kunci: Pemetaan, Pemanfaatan, Pengelolaan, Perhutanan Sosial

ABSTRACT

Social Forestry is a national program for economic equality and reducing inequality through three pillars, namely land, business opportunities and human resources. This study aims to analyze the distribution of social forestry utilization in Bayat Subdistrict, Klaten Regency and analyze the level of activity of farming community groups in social forestry management in Bayat Subdistrict, Klaten Regency. The method in this study is a descriptive analysis method used in describing operational activities

related to the process of social forestry management by farming community groups. Supported by data and information from observations and Participatory GIS mapping, the distribution of social forestry utilization areas is compiled in tabular form, then described and interpreted using qualitative descriptive analysis to describe land use patterns, types of plants, land potential and socio-economic conditions of the community around the social forestry area in the Bayat Subdistrict, Klaten Regency So that the results of the analysis in the form of the distribution of the use of social forestry in Bayat District show that there are 12 villages as social forestry managers and the average percentage of each technical aspect, institutional aspect, social aspect, and economic aspect is used to show the role of farmer groups can be said to be active in forest management. in the Bayat District. The distribution of the use of social forestry produces agricultural areas, plantation areas, livestock areas, fisheries areas and protected forest areas so that the existence of actively managed social forestry can train and develop the talents that exist within farming community groups and generate innovations to create aquaculture businesses capable of explore the benefits of social forestry.

Keywords: Mapping, Utilization, Management, Social Forestry

1. PENDAHULUAN

Hutan mempunyai bermacam-macam sumber daya mampu menjadi sumber kebutuhan ekonomi dan mampu berguna bagi masyarakat sekeliling hutan untuk membantu kebutuhan hidupnya. Keberadaan hutan dapat secara langsung menyediakan pelayanan ekosistem dasar untuk penghidupan dan kesejahteraan sosial masyarakat sekeliling hutan (Murti, 2018).

Keterlibatan masyarakat pengelolaan hutan untuk pengelolaan sumberdaya hutan seharusnya perlu dijalankan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan beberapa alasan seperti di dalam seluruh kawasan hutan Indonesia dan sekitar kawasan hutan ada $\pm 32.447.851$ jiwa yang bertempat tinggal, jumlah desa di dalam hutan sebesar ± 2.037 Desa dan di sekitar hutan sebesar ± 19.247 Desa. Sebagian besar penduduk sekeliling hutan dari dulu sudah menggantungkan hidupnya dari dengan hasil hutan. Serta jika dilihat dari statistik Indonesia tahun 2020 luas wilayah Indonesia sekitar $\pm 120.601.155,73$ Ha berupa kawasan hutan dengan penambahan dan peningkatan jumlah penduduk secara terus menerus. Pemanfaatan hutan secara besar digunakan untuk ekspansi lahan pertanian karena paling mudah dan murah dalam pengelolaan (Ekawati et al., 2020).

Pembagian Ruang lingkup perhutanan sosial mencakup 5 jenis hutan, yaitu: (1) hutan desa, (2) hutan kemasyarakatan, (3) hutan tanaman rakyat, (4) kemitraan kehutanan, dan (5) hutan adat (Ekawati et al., 2020). Pemerintah pusat sudah memberikan wadah untuk hak yang lebih besar bagi masyarakat lokal sekeliling hutan melalui Undang-undang tentang Kehutanan No. 41 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 dan No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35 tahun 2012, yang menunjukkan Wilayah Adat diakui dan bukan menjadi bagian dari Kawasan Hutan Negara. Sehingga untuk tindak lanjut pengawasan pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial sebagai penyempurna atas peraturan-peraturan program perhutanan sosial sebelumnya. Peraturan Menteri LHK secara detail dijabarkan mengenai konsep perhutanan sosial mulai dari penyederhanaan mekanisme proses usulan sampai dengan terbitnya izin perhutanan sosial (Ekawati et al., 2020).

Berdasarkan dari Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial Revisi III Provinsi Jawa Tengah wilayah Kabupaten Klaten termasuk didalam areal perhutanan sosial yang di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi prioritas pengembangan pemanfaatan perhutanan sosial tepatnya di Kecamatan Bayat bersumber dari *website* pkps.menlhk.go.id (2020). Program perhutanan sosial Kabupaten Klaten harus diimbangi dengan pemberian pelatihan bagi masyarakat agar dapat mengelola lahan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sekitar. Perhutanan sosial juga penting untuk menambah asset perlindungan hutan maupun dampak positif terhadap wilayah pengelola baik keberlangsungan ekonomi maupun pengaruh kemajuan sosial wilayah. Sehingga keadaan tersebut menjadi dasar dari dilakukannya penelitian terhadap persebaran pemanfaatan perhutanan sosial di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten serta pengaruh peran kelompok masyarakat tani sebagai pengelola mampu melakukan pemanfaatan hasil hutan dengan optimal. Perhutanan Sosial yang ada juga didukung dengan narasi perhutanan sosial bisa

bermanfaat hingga anak cucu sehingga pengelolaannya harus maksimal. Diharapkan melalui Program Perhutanan Sosial ini pun mampu dengan sendirinya hutan menjadi terawat dengan baik. Meski demikian pemerintah juga bisa lebih massif memberikan pelatihan agar masyarakat dapat mengelola secara tepat pada forum berita dpr.go.id Komisi IV (2017).

2. METODE

Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah metode *Nonprobability Sampling* yang menekankan sampel yang dipilih tidak memberi kesempatan sama bagi semua anggota populasi untuk ditunjuk menjadi sampel, serta dengan Teknik Sempel Jenuh yang merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, karena teknik ini sering digunakan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer didapat dari *Partisipatory GIS*, observasi, wawancara, dan interpretasi citra, serta data sekunder dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten, berupa Data Kawasan Perhutanan, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan, berupa Data Keseluruhan Kelompok masyarakat tani. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode *Partisipatory GIS* dan observasi yang digunakan untuk mengetahui persebaran pemanfaatan perhutanan sosial serta mengetahui secara langsung keadaan dan kondisi lokasi penelitian yang akan dilakukan, yang diharapkan dapat memperoleh informasi mendasar tentang kondisi dan areal tempat penelitian. Metode interpretasi citra yang dijadikan acuan untuk dasar deliniasi didalam pemetaan wilayah yang dimanfaatkan sebagai perhutanan sosial dengan mengenali atau menafsir objek yang terdapat pada citra, untuk kemudian membangun kunci intepretasi. Pengolahan data sekunder dilakukan untuk penentuan wawancara terhadap kelompok masyarakat tani yang berkaitan dengan peran aktif didalam pengelolaan perhutanan sosial. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang menyangkut aspek teknik, aspek kelembagaan, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Teknik pengolahan data yang dilakukan berupa pemetaan spasial dan tabulasi, data hasil dari observasi wilayah pemanfaatan perhutanan sosial akan dilakukan pengolahan dengan aplikasi ArcGis dengan menentukan daerah-daerah menurut karakteristik penggunaan lahan, serta data hasil dari kuesioner diolah dengan tabulasi agar memperoleh tingkat dan peran kelompok masyarakat tani dalam mengelola perhutanan sosial. Dalam proses analisis data menggunakan Metode analisis deskripsi kualitatif, sehingga mampu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dikaji (Aziz, 2014). Metode tersebut mampu digunakan didalam mendeskriptifkan kegiatan operasional yang ada terkait tentang proses pengelolaan perhutanan sosial oleh kelompok masyarakat tani.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Persebaran Pemanfaatan Perhutanan Sosial

Pemetaan Persebaran pemanfaatan perhutanan sosial mampu dilakukan dengan *Partisipatory GIS* dan menghasilkan kawasan pemanfaatan perhutanan sosial yang menjadi suatu gambaran bahwa perhutanan sosial dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat tani dengan dilakukan pengelolaan perhutanan sosial yang terbagi menjadi beberapa macam budidaya.

3.1.1 Data Kawasan Perhutanan Kecamatan Bayat

Kawasan Hutan dalam penelitian ini meliputi keseluruhan luas wilayah hutan untuk peruntukan perhutanan sosial yang tersebar di 12 Desa dari total 18 Desa di Kecamatan Bayat. Hasil survey lapangan menghasilkan keseluruhan 18 Desa yang memiliki perhutanan sosial yaitu Desa Talang, Desa Krakitan, Desa Jotangan, Desa Krikilan, Desa Paseban, Desa Wiro, Desa Kebon, Desa Tawangrejo, Desa Gununggajah, Desa Banyuripan, Desa Nengahan, dan Desa Dukuh. Sedangkan keseluruhan 6 Desa yang tidak memiliki perhutanan sosial yaitu Desa Tegalrejo, Desa Jambakan, Desa Jarum, Desa Bogem, Desa Beluk, dan Desa Ngerangan. Setiap desa memiliki perbedaan pengelolaan terhadap perhutanan sosial hal tersebut didasarkan oleh luas wilayah hutan yang ada,

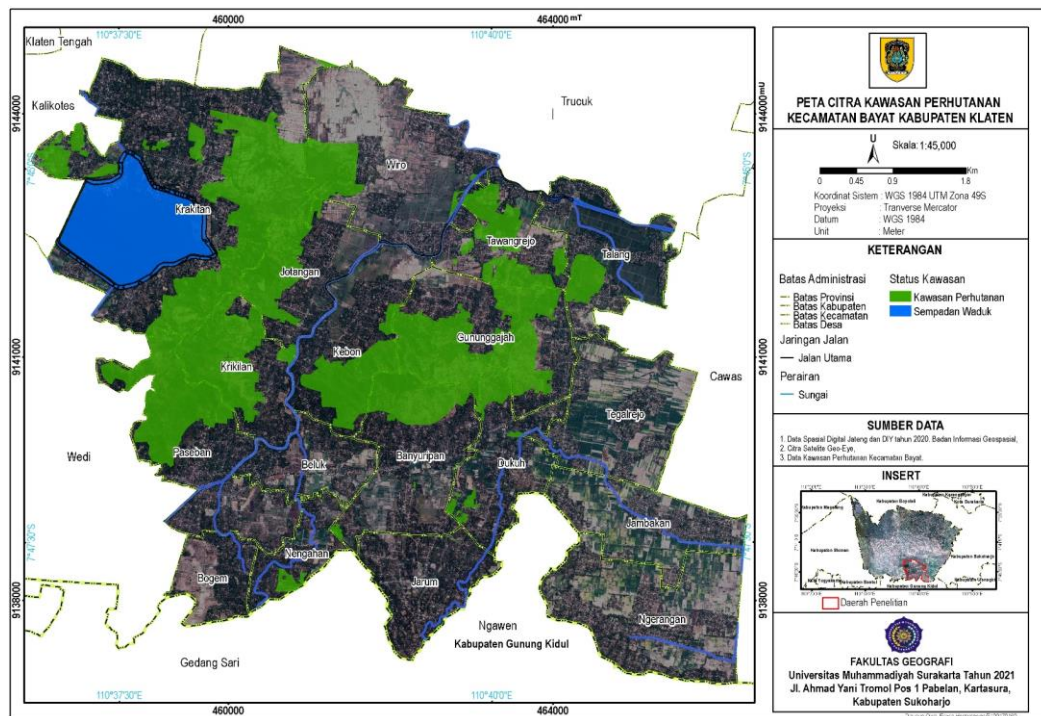
peran keanggota kelompok tani dan juga keadaan karakteristik lahan peruntukan perhutanan sosial.

Tabel 3.1 Luas Hutan Kecamatan Bayat

| No | Desa | Luas Hutan/m ² |
|----|-------------|---------------------------|
| 1 | Krakitan | 398.130 |
| 2 | Jotangan | 266.721 |
| 3 | Krikilan | 392.761 |
| 4 | Paseban | 166.080 |
| 5 | Wiro | 442.175 |
| 6 | Kebon | 657.151 |
| 7 | Tawangrejo | 628.603 |
| 8 | Talang | 212.570 |
| 9 | Gununggajah | 1.514.391 |
| 10 | Banyuripan | 632.397 |
| 11 | Nengahan | 61.025 |
| 12 | Dukuh | 240.323 |

Sumber Dinas Lingkung Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten

Berdasarkan tabel 3.1 di atas diketahui bahwa wilayah kawasan perhutanan di Kecamatan Bayat memiliki cakupan luas wilayah keseluruhan seluas 5.612.327 m² maka dengan rincian berada di Desa Talang seluas 212.570 m², Desa Krakitan seluas 398.130 m², Desa Jotangan seluas 266.721 m², Desa Krikilan seluas 392.761 m², Desa Paseban seluas 166.080 m², Desa Wiro seluas 442.175 m², Desa Kebon seluas 657.151 m², Desa Tawangrejo seluas 628.603 m², Desa Gununggajah seluas 1.514.391 m², Desa Banyuripan seluas 632.397 m², Desa Nengahan seluas 61.025 m², dan Desa Dukuh seluas 240.323 m². Berdasarkan keterangan luas wilayah perhutanan di Kecamatan Bayat, berikut adalah peta kawasan perhutanan Kecamatan Bayat.



Gambar 3.1 Peta Citra Kawasan Perhutanan Kecamatan Bayat.

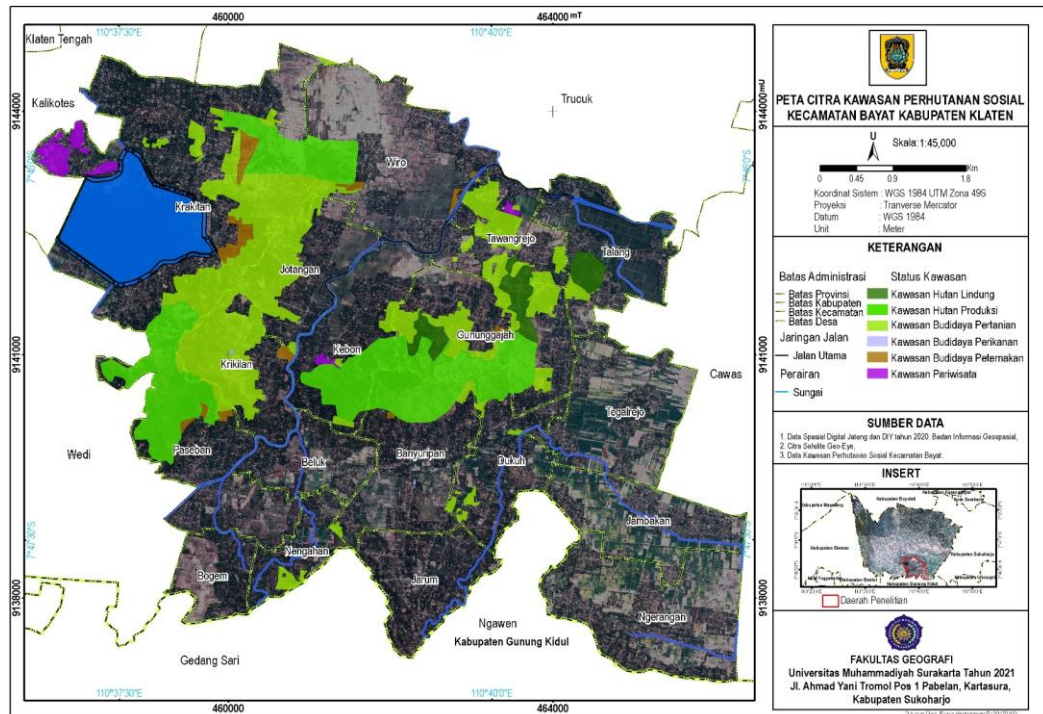
3.1.2 Kawasan Persebaran Pemanfaatan Perhutanan Sosial

Pemetaan kawasan perhutanan sosial menggunakan *Participatory GIS* digunakan untuk menentukan kawasan pemanfaatan perhutanan sosial di Kecamatan Bayat. Proses perbaikan dan pemodelan batas oleh kelompok masyarakat tani dilakukan langsung dengan wawancara terhadap kelompok tani dan melakukan pemetaan *partisipatif* secara langsung saat pertemuan dan observasi lapangan dengan melibatkan pemimpin dan perwakilan kelompok masyarakat tani dengan jumlah keseluruhan 5 (lima) orang, Ketua kelompok tani yang bertanggung jawab didalam penarikan dan penetapan batas kawasan hutan yang digunakan untuk pemanfaatan perhutanan sosial, wakil ketua memberikan data luas wilayah pemanfaatan hutan yang di kelola kelompok tani, dan 3 (tiga) anggota lainnya menerangkan terkait pemanfaatan usaha budidaya yang dikelola oleh anggota kelompok tani, yang berkaitan dengan usaha budidaya yang dilakukan, kualitas hasil panen, serangan OPT tumbuhan dan penyakit hewan yang sering terjadi selama budidaya.

Penerapan metode *Partisipatori GIS* mampu dengan detail menunjukkan persebaran kawasan perhutanan sosial di Kecamatan Bayat, peran serta kelompok tani yang tergolong sangat mengerti cakupan pengelolaan lahan hutan yang sangat pas atau lebih sering menggunakan pedoman wilayah garapan mampu membantu didalam pembatasan wilayah budidaya yang dilakukan. Keseluruhan kelompok tani di Kecamatan Bayat sebagian besar memiliki peran yang sangat vital dalam pengelolaannya, meskipun setiap Desa dilakukan satu kelompok tani, hasilnya tetap optimal didalam pengelolaannya. Kelompok tani pengelola perhutanan sosial diantaranya yaitu Sido Asih, Rejeki, Sedyo Makmur, Rimba Makmur, Guyub, Sri Gumung, Sejati, Sidodadi, Margo Mulyo, Rahayu, Agrosemi, serta Sedyo Mulyo. Keseluruhan kelompok tani tersebut mengelola budidaya untuk memanfaatkan kawasan perhutanan sosial di Kecamatan Bayat. Pemetaan persebaran kawasan perhutanan sosial meghasilkan 5 kawasan hutan yang terdiri dari: kawasan hutan lindung, kawasan budidaya perkebunan, kawasan budidaya pertanian, kawasan budidaya perikanan, dan kawasan budidaya peternakan. Hasil dari persebaran pemanfaatan perhutanan sosial di Kecamatan Bayat sangat berpengaruh terhadap karakteristik lahan yang ada, sehingga banyak pemanfaatan yang berkonsep kawasan budidaya pertanian yang mana keseluruhan dari ke 12 Desa lebih mengarah ke budidaya pertanian, tidak berbeda jauh dengan pemanfaatan perhutanan sosial dengan peruntukan kawasan perkebunan juga terdapat di 7 Desa, kawasan budidaya peternakan juga terdapat di 6 Desa di Kecamatan Bayat, sedangkan hanya sebagian kecil diperuntukkan untuk kawasan perikanan dengan jumlah 2 Desa, dan sisanya dalam peruntukan Hutan Lindung dengan konservasi yang di unggulkan.

Peruntukan kawasan budidaya pertanian terdiri dari keseluruhan Desa di Kecamatan Bayat. Peruntukan budidaya peternakan terdapat di Desa Krakitan, Desa Wiro, Desa Krikilan, Desa Paseban, Desa Banyuripan, dan Desa Gununggajah. Peruntukan budidaya perkebunan terdapat di Desa Krakitan, Desa Krikilan, Desa Paseban, Desa Wiro, Desa Kebon, Desa Gununggajah, Desa Banyuripan, dan Desa Dukuh. Peruntukan budidaya perikanan terdapat di

Desa Krikilan dan Desa Banyuripan. Peruntukan Hutan Lindung terletak di Desa Tawangrejo, Desa Talang, Dan Desa Gununggajah. Berdasarkan keterangan peruntukan wilayah perhutanan sosial dari masing-masing Desa di Kecamatan Bayat, berikut adalah peta citra kawasan perhutanan sosial Kecamatan Bayat.



Gambar 3.2 Peta Citra Kawasan Perhutanan Sosial Kecamatan Bayat

3.2 Peran Kelompok Masyarakat Tani Dalam Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial menjadi sektor yang mampu berperan sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam pengembangan sumber daya manusia pengelola hutan. Keadaan tersebut sangat mendasari sampai saat ini pembangunan kawasan perhutanan masih tergantung terhadap pengelola perhutanan pada umumnya, dengan adanya peran nyata kelompok masyarakat tani, mengakibatkan secara langsung bersinggungan dengan masalah perhutanan mampu menghasilkan suatu kemajuan pemanfaatan perhutanan sosial yang difungsikan untuk pengembangan sektor budidaya. Tingkat keaktifan kelompok masyarakat tani dilakukan dengan pengolahan hasil data *kuesioner* dengan *metode tabulasi* yang mampu menunjukkan *presentase* keaktifan kelompok masyarakat tani melalui 4 aspek

yaitu aspek teknik, aspek kelembagaan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Sehingga mampu mendapatkan keseluruhan peran aktif kelompok masyarakat tani pengelola perhutanan sosial.

3.2.1 Data Kelompok Masyarakat Tani Kecamatan Bayat

Kelompok masyarakat tani yang mengelola perhutanan sosial di Kecamatan Bayat memiliki wewenang untuk mengelola hasil pemanfaatan hutan untuk kawasan perhutanan sosial. Keseluruhan anggota kelompok masyarakat tani di Kecamatan Bayat sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kelompok Tani dan Pemanfaatan Perhutanan Sosial

| No | Nama Kelompok Tani | Desa | Pemanfaatan Perhutanan Sosial |
|----|--------------------|-------------|--|
| 1 | Sido Asih | Paseban | Pertanian, Peternakan, Perkebunan |
| 2 | Rejeki | Krakitan | Pertanian, Peternakan, Perkebunan |
| 3 | Sedyo Makmur | Wiro | Pertanian, Peternakan, Perkebunan |
| 4 | Rimba Makmur | Tawangrejo | Pertanian |
| 5 | Guyub | Nengahan | Pertanian |
| 6 | Sri Gunung | Gununggajah | Pertanian, Peternakan, Perkebunan |
| 7 | Sejati | Krikilan | Pertanian, Peternakan Perkebunan, Dan Perikanan |
| 8 | Sidodadi | Kebon | Pertanian Dan Perkebunan |
| 9 | Margo Mulyo | Talang | Pertanian |
| 10 | Rahayu | Banyuripan | Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Dan Perikanan |
| 11 | Agrosemi | Jotangan | Pertanian |
| 12 | Sedyo Mulyo | Dukuh | Pertanian, Perkebunan |

Sumber: Penulis, 2021

Berdasarkan hasil *survey* dan *observasi* lapangan didapatkan bahwa pengelolaan perhutanan sosial di Kecamatan Bayat dilakukan berdasarkan masing-masing Desa yang mana setiap Desa terdapat satu kelompok tani sebagai kelompok masyarakat tani secara kompleks untuk mengelola dan melestarikan, serta menjaga perhutanan sosial di Kecamatan Bayat. Sehingga total keseluruhan Desa yang ada kawasan hutan untuk perhutanan sosial

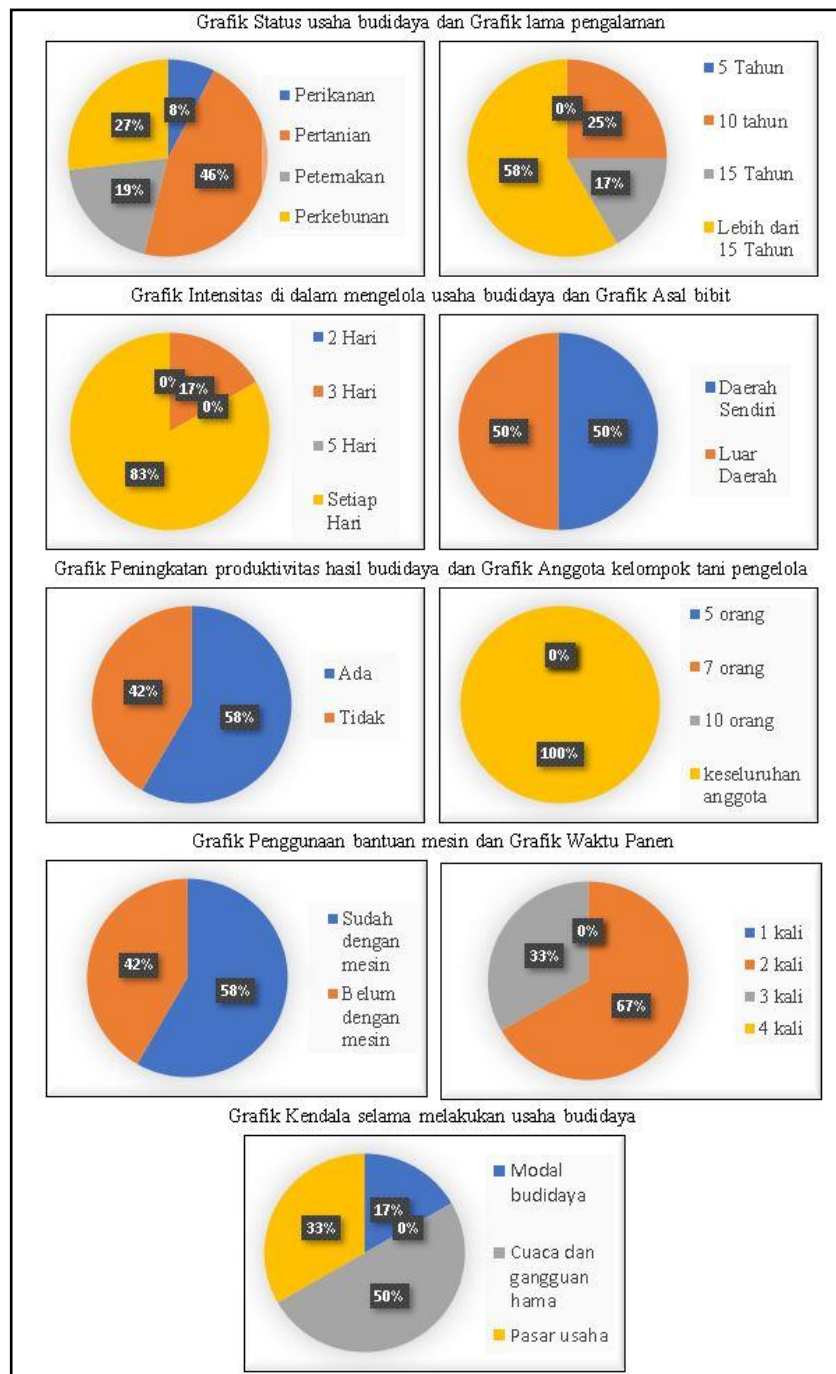
sebanyak 12 Desa dengan kelompok tani di masing-masing Desa, dari total keseluruhan 18 Desa di Kecamatan Bayat.

3.2.2 Hasil Tabulasi Aspek Penentu Keaktifan Kelompok Masyarakat Tani

Hasil pengolahan 4 aspek yaitu aspek teknik, aspek kelembagaan, aspek sosial, dan aspek ekonomi, sehingga dari 4 aspek tersebut dilakukan *tabulasi* dan dihasilkan *presentase* yang dilakukan kelompok tani didalam pengelolaan dan pemanfaatan perhutanan sosial sehingga menjadi dasar analisa untuk mengetahui peran aktif kelompok masyarakat tani pengelola perhutanan sosial.

3.2.2.1 ASPEK TEKNIK

Aspek teknik dalam penelitian ini mencakup gambaran status usaha budidaya, lama pengalaman usaha budidaya, intensitas pengelolaan, asal bibit, peningkatan produksi budidaya, jumlah anggota kelompok tani, sarana pengelolaan budidaya, waktu panen, serta kendala budidaya. Aspek teknik yang dilakukan untuk menganalisa peran aktif kelompok tani mampu menunjukkan gambaran keseluruhan pengelolaan yang dilakukan kelompok tani menurut cakupan teknik di atas serta penentuan aspek teknik digunakan untuk mengetahui kemajuan pengelolaan pemanfaatan perhutanan sosial ditentukan dengan tekni-teknik yang dilakukan kelompok tani. Hasil penelitian terkait aspek teknik kelompok tani yang ada di Kecamatan Bayat dalam memanfaatkan perhutanan sosial dapat dilihat pada gambar 3.4 di bawah ini.



Gambar 3.4 Grafik aspek teknik

Sumber: Penulis, 2021

Keseluruhan Usaha Budidaya yang dilakukan untuk memanfaatkan Perhutanan Sosial di Kecamatan Bayat di dominasi dengan Pertanian dengan total 65% sedangkan untuk perkebunan dan peternakan memiliki 14% dan yang paling sedikit berupa perikanan sebesar 7%. Mayoritas Kelompok Tani

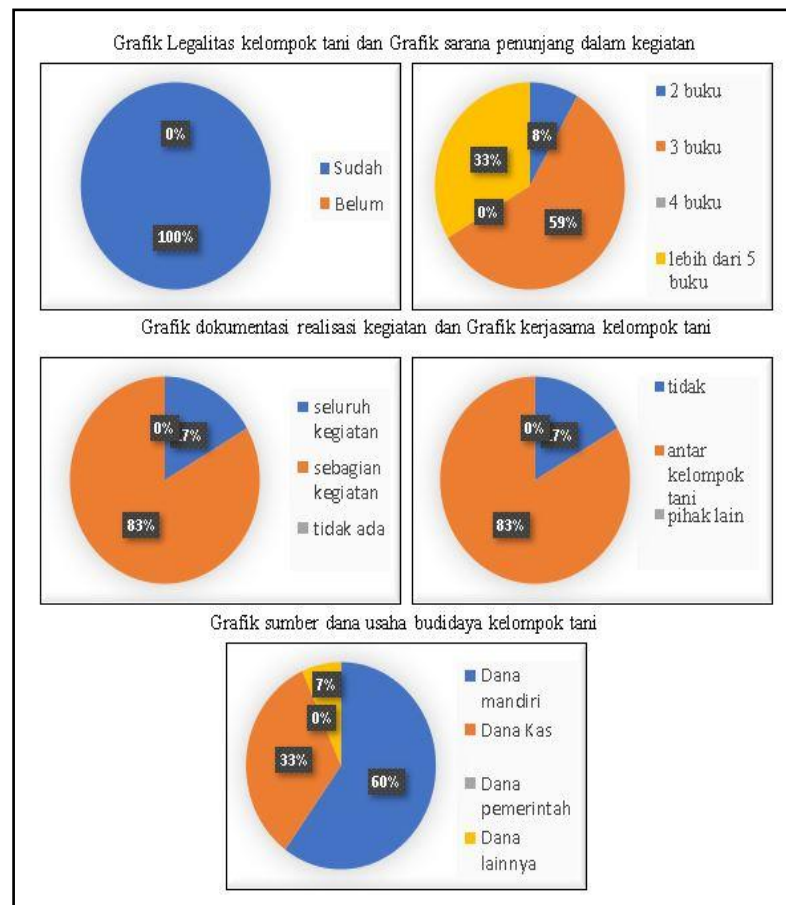
mengelola perhutanan sosial sudah hampir 15 tahun lebih dan dengan umur diantara 50 – 65 tahun, pengelola perhutanan sosial sudah sangat handal didalam mengelola budidaya karena secara keseluruhan sudah memiliki pengalaman yang lumayan lama mengelola di bidang budidaya. Keaktifan pengelolaan perhutanan sosial dapat dilihat dari peran pengelolaan perhutanan sosial yang dilakukan kelompok tani mengakibatkan intensitas pengelelolaan atau pergi menggarap budidaya hampir setiap hari yang mencapai 83% dari total 12 kelompok tani, dengan sisanya hanya sebesar 17 yang menggarap budidaya 3 kali dalam satu minggu. Perolehan Bibit budidaya baik untuk pertanian, peternakan, perikanan, maupun perkebunan lebih cenderung campuran jikalau bibit yang ada di daerah sendiri cukup memadai maka pembelian hanya di daerah sendiri, sedangkan Ketika pasokan bibit rendah atau kurang variasi. Peningkatan produktivitas budidaya yang sering mengalami peningkatan yaitu dalam budidaya pertanian dan peternakan, sedangkan perkebunan dan perikanan cenderung sama tiap tahunnya. namun ada beberapa hasil dari kelompok tani yang mengalami penurunan tyang di sebabkan gagal panen dan factor harga yang relative stabil tidak ada peningkatan sehingga mengakibatkan tidak memiliki hasil jual yang meningkat. Akan tetapi total keseluruhan mencapai 58 % produktivitas budidaya mengalami peningkatan, sedangkan 42% yang lain mengalami penurunan, bisa dibilang hampir setengah dan memiliki perbedaan yang sedikit. Keikutsertaan anggota kelompok tani juga menjadi gambaran bagaimana peran aktif kelompok masyarakat tani didalam pengelolaan perhutanan sosial, dari keseluruhan anggota kelompok tani yang terlibat dalam pengelolaan perhutanan sosial mencapai keseluruhan anggota dengan besaran 100% dari keseluruhan.

3.2.2.2 ASPEK KELEMBAGAAN

Aspek kelembagaan dalam penelitian ini mencakup legalitas kelompok tani, sarana arsip penunjang kelompok tani, dokumentasi realisasi kegiatan budidaya, kerjasama kelembagaan, serta sumber dana usaha budidaya. Aspek kelembagaan digunakan untuk menganalisa keakuratan lembaga kelompok tani pengelola perhutanan sosial yang memiliki izin resmi dari pemerintah daerah

untuk secara langsung berhak penuh atas pengelolaan perhutanan sosial di Kecamatan Bayat.

Legalitas yang sudah ditetapkan pemerintah daerah untuk hak paten dan hak aktif lembaga kelompok masyarakat tani secara keseluruhan sudah memiliki dan sudah terstruktur dengan baik sehingga mencapai 100% lembaga kelompok tani memiliki hak legal didalam pengelolaan perhutanan sosial. Struktural umum dan juga arsip-arsip yang dimiliki kelompok tani memiliki jumlah dan isi kegiatan yang beragam, sehingga total 59% kelompok tani memiliki 3 buku kelembagaan yang aktif dan digunakan, sebesar 8% memiliki 2 buku, serta sebesar 33% memiliki lebih dari 5 buku arsip kelembagaan. Hasil penelitian terkait aspek kelembagaan kelompok tani yang ada di Kecamatan Bayat dalam memanfaatkan perhutanan sosial dapat dilihat pada gambar 3.5 di bawah ini.



Gambar 3.5 Grafik aspek kelembagaan

Sumber: Penulis, 2021

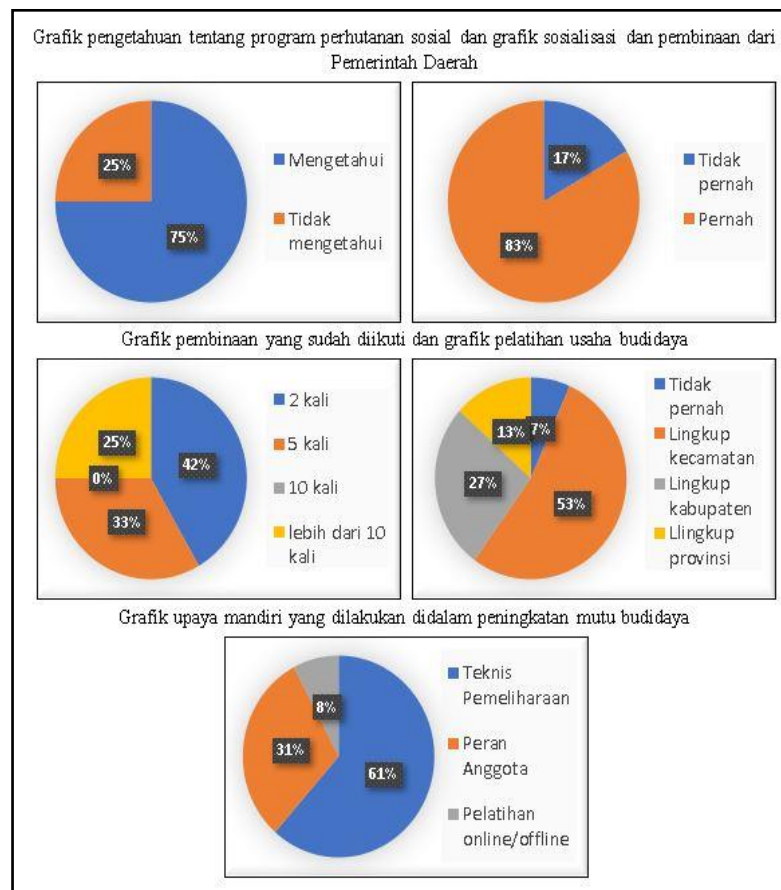
Program pengelolaan perhutanan sosial yang dikelola oleh kelompok masyarakat tani lebih cenderung banyak sekali kegiatan yang hampir setiap minggu melakukan pengontrolan kawasan budidaya dengan serentak, dengan adanya kegiatan tersebut dapat membantu didalam mengelola kondisi budidaya yang dikembangkan maupun alat penunjang yang kurang atau rusak. Sehingga sering melakukan dokumentasi kawasan budidaya yang dilakukan kunjungan atau pengontrolan dan mendapatkan hasil dokumentasi keadaan lapangan Kawasan budidaya dengan besaran presentase 83% memiliki dokumentasi kegiatan, sedangkan sisanya 17% kegiatan memiliki keseluruhan dokumentasi dari tiap kelompok taninya. Kerjasama dalam mengelola perhutanan sosial yang dilakukan setiap kelompok masyarakat tani sangat membantu didalam tukar informasi baik dalam hal pengelolaan, penjualan, maupun perkembangan masalah yang baru-baru muncul, dari total keseluruhan kelompok tani menunjukkan bahwa sebesar 83% kelompok masyarakat tani melakukan kerjasama antar kelompok masyarakat dan sisanya melakukan pengolahan perhutanan sosial dengan mandiri tanpa bekerjasama dengan pihak manapun dengan total sebesar 17%. Dana usaha pengelolaan usaha budidaya di kawasan perhutanan sosial secara keseluruhan banyak yang dilakukan dengan inisiatif pribadi dari masyarakat yang mengelola. Dengan adanya pembagian tidak anggota memperoleh lahan garapan masing-masing menimbulkan sebesar 60% dana usaha budidaya dilakukan mandiri, sebesar 33% dana kas kelompok masyarakat tani, dan yang 7% dana lain lain atau dana tak terduga.

3.2.2.3 ASPEK SOSIAL

Aspek sosial dalam penelitian ini mencakup pengetahuan adanya perhutanan sosial, sosialisasi dan pembinaan pemerintah daerah, keseluruhan pembinaan yang dilakukan dalam waktu satu tahun, pelatihan usaha budidaya oleh kelompok tani, serta upaya mandiri untuk meningkatkan hasil usaha budidaya. Aspek sosial lebih mengarah untuk masyarakat pengelola perhutanan sosial sehingga mampu digunakan untuk menganalisa anggota kelompok tani

dengan baik terhadap adanya program perhutanan sosial dan wawasan pelatihan pengelolaan usaha budidaya yang dilakukan Kecamatan Bayat.

Pengetahuan tentang perhutanan sosial sangatlah dimengerti dari tiap kelompok masyarakat tani karena dengan adanya program perhutanan sosial masyarakat tani sangat di bantu dan mampu menjadi kegiatan penunjang kebutuhan primer. Dari total 75% kelompok masyarakat tani mengerti tentang program perhutanan sosial di Kecamatan Bayat, sedangkan 25% kelompok masyarakat tani tidak mengerti tentang perhutanan sosial. Sosialisasi dan Pembinaa pengelolaan perhutanan sosial yang berkaitan dengan pengetahuan kelompok masyarakat tani terhadap perhutanan sosial, dari total 83% klompok masyarakat tani pernah mendapatkan sosialisasi dan juga pembinaan dari pemerintah daerah, sedangkan 17% tidak pernah mengikuti sosialisai dan pembinaan. Hasil penelitian terkait aspek sosial kelompok tani yang ada di Kecamatan Bayat dalam memanfaatkan perhutanan sosial dapat dilihat pada gambar 3.6 di bawah ini.



Gambar 3.6 Grafik aspek sosial

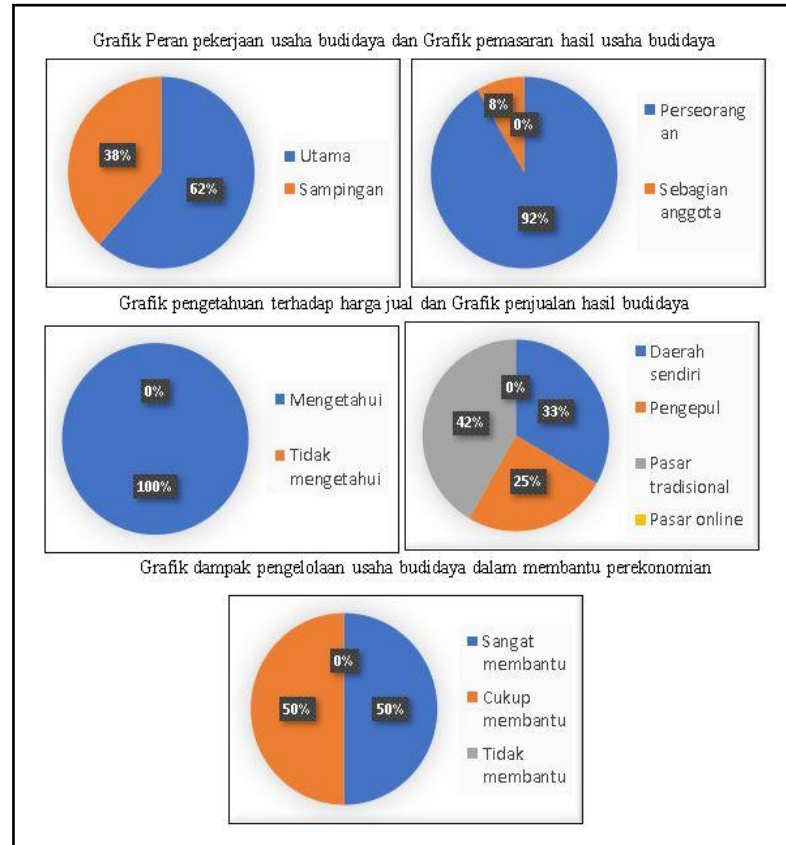
Sumber: Penulis, 2021

Pembinaan kelompok masyarakat tani untuk memajukan usaha budidaya yang dilakukan di kawasan perhutanan sosial sangat berperan dalam kemajuan teknik maupun materiil terhadap pengelolaan usaha budidaya sebesar 42% kelompok tani sudah dilakukan pembinaan 2 kali, sebesar 33% kelompok tani dilakukan pembinaan 5 kali, serta sebesar 25% kelompok tani sudah dilakukan pembinaan lebih dari 10 kali setiap kurun waktu satu tahun. Peran aktif kelompok masyarakat tani didalam memajukan perhutanan sosial menjadi kawasan budidaya yang memiliki prospek jangka panjang yang baik sangat dibantu dengan adanya kegiatan pelatihan yang diadakan pemerintah daerah atau lembaga non pemerintah. Total sebesar 53% kelompok tani sudah mengikuti pelatihan usaha budidaya di lingkup Provinsi, sebesar 27% sudah melakukan pelatihan dalam lingkup Kabupaten, sebesar 13% melakukan pelatihan dalam lingkup Kecamatan, dan sisanya sebesar 7% tidak melakukan pelatihan dimanapun. Upaya-upaya yang perlu dilakukan didalam peningkatan mutu usaha budidaya sebagian besar lebih mengarah dalam teknis pemeliharaan yang dilakukan kelompok masyarakat tani dengan total sebesar 61% anggota kelompok tani perlu meningkatkannya, sebesar 31% perlunya peningkatan peran anggota kelompok tani didalam pengelolaan budidaya di kawasan perhutanan sosial, sedangkan 8% lebih ke dalam pelatihan *online/offline* dalam masalah pemasaran dan penjualan hasil usaha budidaya.

3.2.2.4 ASPEK EKONOMI

Aspek ekonomi dalam penelitian ini mencakup peran usaha budidaya dalam pekerjaan masyarakat tani, pemasaran hasil usaha budidaya, harga jual hasil usaha budidaya, cakupan penjualan usaha budidaya, dan pengaruh pengelolaan usaha budidaya dalam membantu perekonomian masyarakat. Aspek ekonomi digunakan untuk menganalisa pengaruh ekonomi dari hasil pemanfaatan perhutanan sosial secara langsung untuk masyarakat tani di Kecamatan Bayat. Hasil penelitian terkait aspek ekonomi kelompok tani yang

ada di Kecamatan Bayat dalam memanfaatkan perhutanan sosial dapat dilihat pada gambar 3.7 di bawah ini.



Gambar 3.7 Grafik aspek ekonomi

Sumber: Penulis, 2021

Pekerjaan sangatlah penting didalam menopang kehidupan bagi masyarakat kawasan hutan, dengan adanya pekerjaan pokok, tentu lebih menjanjikan didalam kepuasan kehidupan maupun kelangsungan hidup sosial. Jika dilihat mayoritas masyarakat kawasan hutan mengelola budidaya hampir sekitar 62%, hal tersebut menunjukkan masyarakat lebih mementingkan pengelolaan yang sudah menjadi kebiasaan dan digunakan untuk menyambung hidup. Akan tetapi ada juga pengelolaan usaha budidaya perhutanan sosial digunakan sebagai pekerjaan sampingan, biasanya dilakukan oleh anggota yang memiliki umur muda dan maupun yang baru berpindah di Desa, total sebanyak 38% untuk pekerjaan sampingan. Pemasaran yang sering dilakukan dalam hasil usaha budidaya sering dilakukan oleh perseorangan kelompok tani

atau proses pemasaran dilakukan langsung oleh anggota kelompok tani sesuai cakupan lahan budidaya yang digarap. Total sebesar 92% pemasaran dilakukan perseorangan oleh anggota kelompok tani, dan sisanya sebesar 8% dilakukan perwakilan atau sebagian kelompok menjadi satu dan dipasarkan. Masyarakat Kawasan perhutanan sosial paham betul terkait perkembangan harga jual hasil budidaya. Informasi yang cepat meluas dikalangan masyarakat desa Kawasan hutan mampu menjadi penukar informasi yang cukup akurat didalam penurunan maupun kenaikan harga jual hasil budidaya, sehingga total Keseluruhan anggota kelompok tani mengetahui harga jual hasil budidaya. Sangat berkaitan dengan peran kelompok tadi didalam penjualan yang didukung dengan pemasaran secara individu mendorong tingkat penjualan yang sangat besar dilakukan penjualan di pasar tradisional dengan besaran 42%, dan daerah sendiri sebesar 33%, dengan adanya *literasi* yang sangat erat dari masyarakat kawasan perhutanan sosial mendorong penjualan dilakukan di daerah sendiri bagi yang membutuhkan sehingga tercukupi didalam pangan, dan juga akses ke pasar tradisional mampu dengan mudah dilakukan didalam penjualan. Akan tetapi ada juga pengepul yang datang ke kawasan budidaya untuk membeli hasil budidaya yang mana total mencapai 25% penjualan masuk didalam pengepul. Pengelolaan usaha budidaya secara langsung sangat berpengaruh didalam kemajuan perekonomian masyarakat Kawasan perhutanan sosial, dengan adanya lahan garapan yang mampu dimanfaatkan dengan baik dan tanpa ada sewa, mampu menjadikan hasil yang baik untuk penunjang kebutuhan masyarakat. Dari keseluruhan kelompok masyarakat tani sangat mendapat dampak yang cukup hingga sangat besar sekali didalam pengelolaan perhutanan sosial, dengan presentase sebesar 50% sangat membantu dan 50% cukup membantu, sehingga tidak ada pengelolaan perhutanan sosial yang merugikan kelompok masyarakat tani.

3.3. PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persebaran pemanfaatan perhutanan sosial di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten dan menganalisa

keaktifan kelompok masyarakat tani di dalam pengelolaan perhutanan sosial di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, maka analisis dan pembahasan tentang hasil penelitian sebagai berikut:

3.3.1. Persebaran Pemanfaatan Perhutanan Sosial

Persebaran pemanfaatan perhutanan sosial di Kecamatan Bayat terbagi di dalam 5 kawasan pemanfaatan perhutanan sosial oleh masyarakat sekitar hutan atau lebih tepatnya sebagai pengelola yaitu kelompok masyarakat tani yang ada di setiap Desa di Kecamatan Bayat, Pemanfaatan hutan sebagai perhutanan sosial dilakukan dengan *participatory mapping* yang mana untuk mengetahui batasan pemanfaatan perhutanan sosial dilakukan dengan peran partisipasi langsung dari kelompok masyarakat tani untuk membatasi pemanfaatan yang dilakukan, dengan adanya peran masyarakat yang secara langsung mampu menghasilkan suatu lingkup kawasan perhutanan sosial yang ada di Kecamatan Bayat secara detail dan sesuai dengan keadaan riil di lapangan, peran partisipasi kelompok masyarakat tani sangatlah berperan penting dalam pemetaan perhutanan sosial untuk pemanfaatan ke 5 kawasan budidaya yang dilakukan masyarakat tani.

Pemanfaatan perhutanan sosial terdapat di 12 Desa dari total 18 Desa di Kecamatan Bayat dan mencakup kawasan budidaya pertanian, kawasan budidaya pekebunan, kawasan budidaya perikanan, kawasan budidaya peternakan, dan kawasan hutan lindung. Adapun kelima pemanfaatan perhutanan sosial tersebut dilakukan oleh kelompok tani masing-masing desa, yaitu Desa Krakitan, Desa Jotangan, Desa Krikilan, Desa Paseban, Desa Wiro, Desa Kebon, Desa Tawangrejo, Desa Talang, Desa Gununggajah, Desa Banyuripan, Desa Nengahan, dan Desa Dukuh. Pemanfaatan perhutanan sosial untuk kawasan budidaya perikanan dilakukan kelompok tani Desa Banyuripan dan Desa Krikilan. Pemanfaatan perhutanan sosial untuk kawasan budidaya peternakan dilakukan kelompok tani Desa Krakitan, Desa Wiro, Desa Krikilan, Desa Paseban, Desa Banyuripan, dan Desa Gununggajah. Pemanfaatan perhutanan sosial untuk kawasan budidaya perkebunan dilakukan kelompok tani di Desa Krakitan, Desa Krikilan, Desa Paseban, Desa Wiro, Desa Kebon,

Desa Gununggajah, Desa Banyuripan, dan Desa Dukuh. Pemanfaatan perhutanan sosial untuk kawasan hutan lindung terdapat di Desa Tawangrejo, Desa Talang, dan Desa Gununggajah. Sedangkan kawasan budidaya pertanian dilakukan kelompok tani diseluruh ke 12 Desa di Kecamatan Bayat.

Keadaan lahan yang dimanfaatkan juga tidak terlepas dari pemilihan karakter yang pasti mendukung terhadap keberlangsungan budidaya yang dilakukan kelompok masyarakat tani. Kebutuhan bahan pokok pupuk maupun akses untuk pemanenan juga harus disesuaikan dengan keadaan kawasan budidaya yang ada, pemilihan lereng yang *relative* tidak terjal mampu lebih dimanfaatkan dengan budidaya pertanian dengan membentuk sistem terasering sehingga cukup mampu optimal dengan mengurangi tingkat erosi yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Pemanfaatan kawasan perhutanan sosial di daerah datar sering dilakukan untuk budidaya peternakan dan juga perikanan, dikarenakan kebutuhan bahan makanan ternak maupun perikanan harus selalu terjaga apalagi untuk kondisi air harus segera tercukupi dan tidak boleh kekurangan, hal tersebut juga mendasari bagaimana pemanfaatan perhutanan sosial wilayah datar untuk peternakan dan perikanan mampu dengan mudah mendapatkan air untuk keperluan budidaya, serta untuk pakan ternak mampu didistribusikan lebih cepat dengan akses yang mudah dan tempat untuk pengolahan sisa limbah peternakan dan perikanan mampu diolah ataupun dibuang tanpa ada kendala lokasi yang jauh atau sulit di akses. Keseluruhan budidaya yang dilakukan banyak terdapat yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sehingga didalam pemanfaatan tersebut mampu didasarkan oleh keadaan wilayah yang berbeda dari satu kawasan budidaya dengan Kawasan budidaya lain, akan tetapi disetiap Kawasan budidaya memiliki persamaan didalam karakter lahan yang ada dengan adanya keadaan tersebut bahwa sudah dipastikan penyesuaian karakter lahan mampu memberikan pengaruh didalam keberlangsungan pemanfaatan perhutanan sosial dengan beberapa pengelolaan budidaya yang dilakukan kelompok masyarakat tani.

3.3.2. Tingkat keaktifan Kelompok Tani dalam mengelola Perhutanan Sosial

Kelompok masyarakat tani memiliki tanggung jawab yang sangat besar di dalam kelestarian perhutanan sosial yang mana perhutanan sosial juga mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat yang tergabung dalam kelompok masyarakat tani. Perhutanan sosial di Kecamatan Bayat dikelola oleh 12 kelompok masyarakat tani yang diantaranya Poktan Sido Asih Desa Paseban, Poktan Rejeki Desa Krakita, Poktan Makmur Desa Wiro, Poktan Rimba Makmur Desa Tawangrejo, Poktan Guyup Desa Nengahan, Poktan Sri Gungng Desa Gununggajah, Poktan Sejati Desa Krikilan, Poktan Sidodadi Desa Kebon, Poktan Sri Margo Mulyo Desa Talang, Poktan Mugi Rahayu Desa Banyuripan, Poktan Agrosemi Desa Jotangan, dan Poktan Sedyo Mulyo Desa Dukuh. Keseluruhan kelompok tani tersebut mampu mendorong suatu pemanfaatan perhutanan sosial yang sangat maju dimana pemeliharaan dan pengelolaan mampu dilakukan secara tertata, disetiap anggota kelompok tani memiliki wilayah pengelolaan yang berbeda tidap individu. Kawasan pemanfaatan budidaya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan sangat maju pesat dan tergolong bervariasi didalam hasil budidaya yang diunggulkan oleh masing-masing kelompok tani setiap Desa di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, tingkat peran aktif didalam pengelolaan perhutanan sosial didasarkan dalam 4 aspek yang menjadi dasar umum untuk mengetahui kinerja Poktan, ke 4 aspek tersebut memiliki peranan didalam aspek sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan kelompok tani, jika dilihat dari keseluruhan aspek yang dilakukan didalam penelitian kali ini bahwa didalam aspek teknis yang mencakup jenis budidaya yang dilakukan di kawasan perhutanan sosial mampu menggambarkan bahwa keadaan Poktan ternyata sudah dikatakan aktif dalam pengelolaan, tidak hanya itu didalam intensitas pemantauan atau melakukan budidaya hampir dilakukan setiap hari, yang mana didalam sektor pertanian perkebunan, perikanan, dan peternakan dilakukan pengelolaan setiap hari oleh keseluruhan anggota yang terlihat didalam gambar 4.8 mampu bernilai 100% bahwa peran Poktan sangat aktif sekali dan berusaha sekali didalam pengelolaan perhutanan sosial di Kecamatan Bayat.

Terlepas dari aspek teknik yang mampu menggambarkan peran aktif Poktan aspek sosial juga menjadi gambaran peran aktif kelompok masyarakat tani bahwa intensitas pemeliharaan budidaya yang dilakukan masyarakat didasarkan karna lebih dari total keseluruhan anggota kelompok tani mengelola perhutanan sosial menjadi pekerjaan utama, pekerjaan utama itu berarti bahwa mereka memang benar memanfaatkan perhutanan sosial untuk keberlangsungan hidup, meskipun demikian bahwa ada juga pemanfaatan perhutanan sosial dilakukan untuk hanya sebatas pekerjaan sampingan hal tersebut mampu dilakukan jika semua pekerjaan didasarkan untuk penunjang kebutuhan hidup dan masyarakat sekitar hutan sendiri mengantungkan hidupnya didalam pemanfaatan kawasan hutan tersebut. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa keaktifan kelompok tani di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten sangat berperan aktif dalam pengelolaan perhutanan sosial. Hubungan kerjasama antar kelompok tani juga sangat terjalin didalam pengelolaan satu kesatuan perhutanan sosial di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Kerjasama yang dilakukan menimbulkan kepekaan batin maupun kemajuan terhadap sistem pengelolaan perhutanan sosial di Kecamatan Bayat. Kerjasama yang dilakukan mampu menciptakan saling tukar pandangan dan pemikiran yang dilakukan untuk kemajuan pemanfaatan perhutanan soail, terkait masalah yang timbul secara tidak menentu mampu dilakukan diskusi guna penyelesaian masalah dan juga yang sering muncul seperti banyaknya gangguan OPT, baik wereng, keong, tikus dan organisme / penyakit ternak lainnya. Sangat banyak dilakukan kejasaama didalam keberlangsungan pengeloaaan perhutanan sosial, maka dari itu sudah dapat dikatan bahwa peran aktif kelompok tani di Kecamatan Bayat sangatlah aktif didalam birokrasi maupun pemelahaaraan jangka pendek dan panjang terkait perhutananana sosial.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Persebaran pemanfaatan perhutanan sosial di Kecamatan Bayat menunjukkan terdapat 12 desa sebagai pengelola perhutanan sosial. Persebaran pemanfaatan perhutanan sosial menghasilkan wilayah kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan dan kawasan hutan lindung. masing-masing kawasan secara keseluruhan menunjukkan kawasan pertanian dan perkebunan menjadi sektor budidaya yang sangat banyak dilakukan didalam pemanfaatan perhutanan sosial, karena persebaran pemanfaatan perhutanan sosial menunjukkan keseluruhan Desa terdapat kawasan budidaya pertanian dan 7 desa terdapat kawasan perkebunan. keselarasan terhadap karakteristik lahan di wilayah Kecamatan Bayat yang ada mampu sangat berpotensi untuk dilakukan budidaya pertanian dan perkebunan. kawasan budidaya peternakan dan perikanan cenderung terdapat di wilayah Kecamatan Bayat yang memiliki topografi wilayah yang datar dan dekat dengan sumber air yang banyak.
2. Pengolahan keempat aspek yang berpengaruh besar didalam peran aktif kelompok masyarakat tani mampu menghasilkan bahwa peran aktif kelompok masyarakat tani mampu sangat berperan langsung didalam pemanfaatan perhutanan sosial hal tersebut didasarkan dalam adanya 4 sektor budidaya yang dikelola, keterlibatan seluruh anggota kelompok tani, kerjasama yang sangat terjalin dalam kelompok tani serta pengaruh ekonomi yang mampu berdampak langsung didalam masyarakat. Tingkat Keaktifan kelompok masyarakat tani mampu terlihat secara langsung karena kelompok masyarakat tani dengan pengetahuan dan juga kerelaan sepenuh hati dalam mengelola perhutanan sosial mampu menjadikan manfaat materiil, pengalaman, maupun terbentuknya inovasi pemanfaatan perhutanan sosial. Sehingga sangat terlihat didalam pengelolaan perhutanan sosial di Kecamatan Bayat peran aktif kelompok tani sangat dominan baik dari pemeliharaan dan juga pengelolaan yang dilakukan untuk memanfaatkan

secara keseluruhan sumber daya di kawasan perhutanan sosial Kecamatan Bayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. S. (2014). (2014). Perancangan sistem informasi akuntansi penjualan dan persediaan pada Koperasi Mahasiswa UIN Maliki Malang. *E-Theses Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.*, 74–78. Diakses pada, dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/1960/>.
- Dpr.go.id. (2017). Forum berita Perhutanan Sosial. Diakses pada 26 Maret 2021, dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/18528/t/javascript>.
- Murti, H. A. (2018). Perhutanan sosial bagi akses keadilan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. *Jurnal Analis Kebijakan*, 2(2), 62–75.
- Pkps.menlhk.go.id. (2020,). Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial Revisi III Provinsi Jawa Tengah. Diakses pada 26 Maret 2021, dari <http://pkps.menlhk.go.id/>.
- Sulistya Ekawati, Sri Suharti, dan Syaiful Anwar. (2020). *Bersama Membangun Perhutanan Sosial* (Dana Apriyanto. Hariono. dan Diny Darmasih. (ed.); 1 juli 202, Issue 13). IPB Press.